



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA

UNIT KERJA : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ATIK SUDARMI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **454506**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 595.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/115 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 285.000.000
2. Tanah Seluas 493 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 190.000.000
3. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 132.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2012, HASIL SENDIRI , HADIAH ,
Rp. 55.000.000
3. MOBIL, HONDA CR-V RE1 2WD 2.0 AT Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 65.000.000
4. MOTOR, HONDA F1C02N46LO A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 355.093.580**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.082.593.580**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.082.593.580

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.